



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 25 Maret 2024
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Perkenalan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI 2. Membahas Program Kerja
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 32 (tiga puluh dua) dari 48 (empat puluh delapan) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, dengan agenda perkenalan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan membahas program kerja, hari Senin, 25 Maret 2024, dibuka pukul 15.08 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

RI, dengan agenda pengenalan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan membahas program kerja, yaitu:

1. Capaian kinerja realisasi pelaksanaan anggaran dan fisik tahun 2023: Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2023 alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp8.072.163.385.000,00. Adapun capaian realisasinya sebesar Rp7.874.964.280.962,00 atau sebesar 97,56%. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2023, dari target sebesar Rp2,5 triliun, realisasi capaiannya melebihi target, yakni sebesar Rp3,05 triliun atau sekitar 121,89%.
2. Rancangan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN tahun 2024; merujuk pada rancangan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Kemudian, dijabarkan dalam tematik perencanaan tahunan, yang merupakan tahun “Institusi Berstandar Dunia”, sebagai pelaksanaan tahun keempat Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian ATR/BPN, tahun 2020-2024. Rancangan tersebut memprioritaskan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. Digitalisasi data pertanahan (Layanan Elektronik dan Sertipikat Elektronik);
  - b. Percepatan pemenuhan peta panjang batas kawasan hutan;
  - c. Percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
  - d. Manajemen aset lahan dalam pemberdayaan masyarakat (Reforma Agraria) yang terdiri dari Aset Reform (Redistribusi Tanah) dan Akses Reform; yang merupakan *major project* dalam rangka mendukung pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
  - e. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  - f. Pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas;
  - g. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
  - h. Percepatan rencana tata ruang pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota;
  - i. Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, yang difokuskan pada:
    - Penguatan kelembagaan;
    - Penerapan *human capital management*;
    - Penguatan kerangka regulasi;
    - Tata kelola dan layanan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada publik; serta
    - Penerapan manajemen risiko dan manajemen strategi.

### III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, dengan agenda pengenalan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan membahas program kerja, yaitu:

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada kementerian ATR/BPN RI terhadap capaian realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp7.874.964.280.962,- (*tujuh trilyun delapan ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*) atau sebesar 97,56% dan mendorong Kementerian ATR/BPN RI terus meningkatkan kinerja agar target program prioritas pertanahan dapat tercapai lebih optimal.
2. Komisi II DPR RI mendukung Kementerian ATR/BPN RI untuk mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp675.897.312.000,- (*enam ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah*) yang bersumber dari penerimaan PNPB 2023 yang akan dialokasikan untuk kegiatan PTSL, RDTR, penyiapan 104 Kabupaten/Kota lengkap dan transformasi digital.
3. Komisi II DPR RI mengapresiasi realisasi target PTSL sebesar 101,87%, namun meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI agar kedepannya tidak sekedar mengejar target, tetapi tetap memperhatikan dan menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih pendaftaran tanah yang dapat menimbulkan konflik dan sengketa tanah di kemudian hari.
4. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN RI untuk dapat menjadi sentral registrasi sistem pertanahan (*single land administration system*) dalam mewujudkan sistem pemetaan nasional (*one map policy*), dan meminta Kementerian ATR/BPN RI untuk segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian lainnya.
5. Terhadap Kasus Mafia Tanah Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk membuat terobosan penyelesaian Kasus Mafia Tanah dengan merespon cepat laporan masyarakat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI melalui Satgas Mafia Tanah, serta melakukan pengawasan internal dan pembenahan dalam tubuh Kementerian ATR/BPN RI.

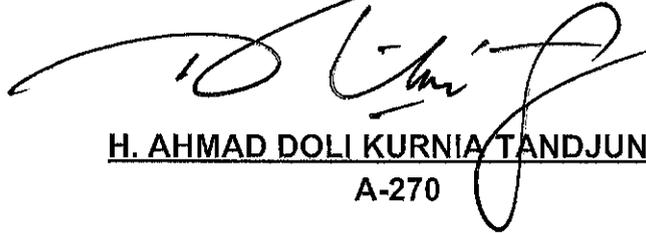
6. Menyikapi permasalahan tumpang tindih regulasi dan penyelesaian seluruh masalah pertanahan, Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN RI sepakat untuk pembentukan RUU tentang Pertanahan.

#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.05 WIB.

Jakarta, 25 Maret 2024

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270